



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 634 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenai informasi yang dikecualikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kuala Kurun  
Pada tanggal : 14 Nopember 2017



**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
5. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 634 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 NOPEMBER 2017

TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DIKABUPATEN GUNUNG MAS

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
I.	Informasi Politik dan Hankam				
1	Informasi intelejensi Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf c UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</li> </ul>	Tidak terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi informasi Negara dari kebocoran
2	Dokumen Persandian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiogram/Kawat Bersandi, berita sandi;</li> <li>- Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian;</li> <li>- Kunci sistem, frekuensi Radio komunikasi, jalur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 tentang KIP;</li> <li>- UU No.3/2002 ttg Pertahanan Negara</li> </ul>	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi Bersandi dari kebocoran

3	<p>komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian.</p> <p>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan Pengawasan orang Asing</li> <li>- Penanganan Konflik Daerah</li> <li>- Peningkatan Kewaspadaan</li> <li>- Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan</li> </ul>	<p>- Keputusan Bupati Gunung Mas No. 16 Tahun 2017 tentang pembentukan tim dan koordinasi sekretariat pemantauan kegiatan orang asing nor. government organization dan lembaga asing Kabupaten Gunung Mas</p> <p>- Keputusan Bupati Gunung Mas No 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan tim terpadu secretariat penanganan konflik social dalam negeri lingkup kabupaten Gunung Mas</p>	<p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p>	<p>Warga Negara Asing bersembunyi dan menghindari pada saat pengawasan</p> <p>Konflik antara masyarakat dengan PBS dapat teratasi</p> <p>Masyarakat dapat mendeteksi secara dini keadilan daerah</p> <p>Dapat mengetahui sebab terjadinya tingkat kejahatan</p>	<p>Terkendalinya kegiatan orang asing</p> <p>Terciptanya stabilitas keamanan Kabupaten Gunung Mas</p> <p>Antisipasi anggaran Keamanan</p> <p>Terciptanya keamanan Kabupaten Gunung Mas</p>
---	--	---	---	---	--

4	Forum kewaspadaan Dini masyarakat ( FKDM )	Keputusan Bupati Gunung Mas No 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Panasehat, Penetapan Keanggotaan dan Sekretariat dsn Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kabupaten gunung Mas Tahun 2017	Tidak terbatas	Sebagai perpanjangan tangan masyarakat dsn pemerintah daerah untuk ikut membantu situasi dan kondisi daerah	Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban
5	Program Pemeliharaan Kantrاتبmas dan Pencegahan Tindak Kriminal - Komunitas Intelejen Daerah  Rencana Aksi Daerah	Keputusan Bupati Gunung Mas No 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan keanggotaan komunitas intelejen daerah Kabupaten Gunung Mas  Keputusan Bupati Gunung Mas No.19 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Terpadu Sekretariat Penanganan Konflik	Tidak Terbatas  Tidak Terbatas	Bersifat rahasia anggota komunitas intelejen daerah sehingga dapat terjaga keamanan dan ketertiban daerah  Bersifat Rahasia karena pelaporan	Antisipasi gangguan keamanan  Seluruh Kegiatan tim terpadu dapat dilaporkan Ke Pusat

6	Tim Koordinasi pemantauan Pelaporan dan evaluasi situasi Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2018	social dalam Negeri lingkup Kabupaten Gunung Mas		dari hasil/ spj kegiatan Tehnis kegiatan	Terciptanya pelaksanaan Pilkada yang LUBER dan JURDIL
7	Sosialisasi Peningkatan Demokrasi	Peraturan Menteri Dalam No 61 Tahun 2011 tentang pedoman pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2010 tentang		Dapat menyamakan persepsi antara KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota. Badan Pengawas Pemilihan umum Propinsi, Kabupaten / Kota, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam koordinasi Pemantauan, Pelaporan dan evaluasi situasi politik pada Pilkada Serentak 2018  Dapat menciptakan stabilitas politik yang kondusif pelaksanaan	Terciptanya kehidupan demokrasi yang baik

8	Pendataan Parpol dan Ormas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik</li> <li>- Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik</li> <li>- Perpu No 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan</li> </ul>		<p>Pilkada serentak tahun 2018</p> <p>Dapat Memberikan dukungan kelancaran Pilkada serentak Tahun 2018 dan menciptakan rasa aman bagi Masyarakat</p> <p>Dapat pelaksanaan Pilkada 2018.</p> <p>Meningkatkan peran serta generasi muda.memimalisir angka golput pada Pelilih Pemula dalam pelaksanaan Pemilu, serta Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di kalangan Generasi Muda</p>	Keberadaan Parpol dan Ormas menjadi terpantau
---	----------------------------	---	--	---	---

9	Daftar Anggota/orang yang Terlibat Organisasi Terlarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 ttg KIP;</li> <li>- Pasal 66 ayat 3 huruf H UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih berlaku;</li> <li>- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
10	Internet protokol/IPA address Private, Bandwidht Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, system management Data base	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf i UU no. 14/2008</li> <li>2. Pasal 30 s/d pasal 37 UU no.11/2008 ttg ITE</li> </ol>	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/men gamakan perangkat serta data
II	Informasi Pemerintahan				
11	Dokumen Perencanaan Desa(RPJM Desa dan RKP Desa)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	Selama diperlukan pengecuaiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
12	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat	Dapat merugikan ketahanan	- Melindungi ketahanan ekonomi

	kepentingan umum/ non kepentingan umum pada kab/kota atau lebih		Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	ekonomi nasional; - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	nasional; Mengamankan proses penyusunan kebijakan
13	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/wakil Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama diperlukan pengecualia nnya Selama diperlukan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15	Naskah Ujian Tertulis bagi bakal calon kepala desa, perangkat desa, maupun aparatur pemerintah lainnya	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama diperlukan	Menghambat proses seleksi	Mengamankan proses seleksi

III	Informasi Hukum	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya proses pengusutan	-	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
16	Dokumen pelanggaran Hutan yang berkaitan dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal logging/illegal trending di kawasan hutan raya (TAHURA LAPAK JARU) Kabupaten Gunung Mas	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	-	-	-
17	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf i UU No.14/2008	Tidak terbatas	Pelanggaran HAM( terkait azas praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi
18	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan ke persidangan	-Pasal 70 ayat (2)UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagai mana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 1981; Pasal 17 huruf a dan i UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	1 tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
19	Kasus-kasus yang berkaitan dengan anak Berhadapan dengan Hukum(ABH); Anak kasus pelecehan seksual / kekerasan, baik	-UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; -Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 tentang KIP	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

	sebagai pelaku maupun sebagai korban;		yang bersangkutan / pihak yang berwenang	rahasia pribadi;	Hukum; - Melindungi data pribadi
20	Rencana penertiban/ penindakan & penegakan pada obyek tertentu	Pasal 17 huruf a UU No.14/2008 tentang KIP	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan	Operasi penindakan berjalan sesuai rancangan
21	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan perda	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No.14/2008 tentang KIP	Sampai selesainya kasus	Menggagalkan rencana operasi dan penertiban	Kelancaran proses penegakan hukum
22	Proses penyelidikan dan penyidikan ditangani oleh PPNS dan rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	- Pasal 17 UU No.14/2008 tentang KIP; - UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai selesainya kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
23	Proses penyelesaian sengketa	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No.14/2008 tentang KIP	Sampai dengan diserahkan kepada Penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Memperlancar proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum
24	Rencana operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	- UU No.14/2008 - UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan	Sampai selesai pelaksanaan pengawasan	Menghambat kesuksesan kebijakan	Membantu badan publik dalam mencapai

		Angkutan Jalan			keberhasilan pelaksanaan kebijakan
25	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008 tentang KIP	Sampai selesai proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
IV	Informasi Kesekretariatan				
26	Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang bersifat tertutup, meliputi Laporan singkat, Catatan rapat, Risalah, Slide presentasi dan Rekaman/transkrip suara/pembicaraan dan Keputusan rapat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
27	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Melindungi kerahasiaan dokumen
28	Disposisi surat Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang pedoman tata naskah</li> </ul>	- Sampai dengan atau batas waktu	Membahayakan apa bila sifatnya sangat prinsipil	Untuk mengetahui kearah mana

		<p>dinas dilingkungan pemerintah daerah; Perbup Gunung Mas No. 16 Tahun 2011 tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah kabupaten gunung mas</p>	<p>proses kegiatan/peleaksanaan/tugas/penanganan Sampai dengan atau batas waktu proses kegiatan/peleaksanaan/tugas/penanganan</p>	<p>dikarenakan menghasilkan informasi tentang suatu disposisi/kebijakan yang akan merugikan pimpinan sebagai pengambil keputusan apabila jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dan di sebar luaskan</p> <p>Seharusnya disposisi sifatnya sangat penting menjadi tidak bermamfaat dan membahayakan si pemberi disposisi</p>	<p>kebijakan pimpinan untuk menjalankan suatu proses kerja instansi dipemerintahannya</p>
29	<p>Draf Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas (Renja) dan Draf</p>	<p>Pasal 17 huruf 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Sampai mendapat penetapan dari Bupati</p>	<p>Dapat mengganggu proses penyusunan</p>	<p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>

	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan			kebijakan	
30	Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Selama masa berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
V	Informasi Keuangan dan Asset				
31	Exercise/perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (j) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Sampai ditetapkan dalam Perda	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari dari terjadinya kesalahan pemahaman informasi dimata publik
32	Seluruh dokumen Pengelolaan Keuangan Tahun Berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
33	Rincian dan Harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan	Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan	Mengakibatkan pelelangan jadi tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungja

	dalam proses lelang		barang/jasa	Mengakibatkan	wabkan
34	Dokumen Kontrak pengadaan barang/jasa Dinas yang mempunyai paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011.</li> </ul>	Sampai dengan penyerahan ke dua	<p>timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait</p> <p>Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara</p>	Melindungi pihak yang terlibat kontrak
35	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang sedang dalam proses (surat, nota, dinas, berita acara, surat keputusan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	<p>Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara</p>	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
36	Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>	Sampai dengan diperoleh kepastian hukum	<p>Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara</p>	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
37	Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang belum di audit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>	Sampai ditetapkan sebagai dokumen	<p>Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara</p>	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara

38	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (j) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;</li> <li>- UU No. 15/2004 tentang berbandaharaan Negara;</li> <li>- UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.</li> </ul>	Selama masih berlaku	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
39	Laporan pajak pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf 3 dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi
40	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengakibatkan timbulnya permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi pihak yang terlibat kontrak
41	Seluruh dokumen pengelolaan keuangan	- Pasal 17 huruf (j) UU No. 14 Tahun 2008	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbulnya	Melindungi dan mengurangi

	tahun berjalan	tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.		permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	penyalahgunaan dokumen Negara
42	Rincian harga satuan dalam perhitungan hitungan harga perhitungan sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	- Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan yang tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan
43	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian snggah	- Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan yang tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan
44	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	- Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
45	Dokumen pelaksanaan pekerjaan : - Konsultasi	- UU No. 15/2004 tentang perbendaharaan	Sampai proses audit selesai	Pekerjaan masih berlangsung sehingga	Menghindari terjadinya kesalahpahaman

	(perencanaan, dan pengawasan manajemen konstruksi) antara lain produk laporan <ul style="list-style-type: none"> <li>Konstruksi (laporan mingguan, bulanan, MCO. MC100, berita acara dan sejenis lainnya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negara; UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klarifikasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum</li> </ul>		dimungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan	informasi di mata publik
46	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik Negara (BMD) yang sedang dalam proses (Surat, Nota Dinas, Berita Acara dan Surat Keputusan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapar menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
47	Data BMD berupa Tanah belum memiliki Surat Bukti Kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>	Sampai dengan diperoleh kepastian hukum	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik

48	Laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas yang belum di audit oleh auditor internal dan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ul>	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
49	Data obyektif dan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40;</li> <li>- Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi
50	Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40;</li> <li>- Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
51	Dokumen Keuangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pertanggungjawaban (SPJ)</li> <li>- Bukti-bukti/kwintasi dan pendukung</li> <li>- SPP/SPM, UP, GU, TU dan LS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan</li> </ul>	Selama masih berlaku	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara

52	Rincian harga satuan perhitungan HPS yang dalam proses lelang	Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa	Mengakibatkan pelepasan menjadi persaingan yang tidak sehat	Melindungi pelepasan tetap dapat dipertanggungjawabkan
53	Dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) <ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP regular</li> <li>- LHP khusus</li> <li>- Penyelesaian Rekomendasi tindak lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011</li> </ul>	Sampai dengan adanya persetujuan pihak-pihak yang berwenang untuk dibuka	Mengakibatkan dokumen dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
54	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD Negara RI Tahun 1945, pasal 28a s/d 28.h;</li> <li>- Pasal 17 huruf I dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan</li> </ul>	Terbatas sampai proses pengadaan barang/jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian

55	Data debitur dana bergulir	barang/jasa pemerintahan Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada ijin dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
56	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)		Terbatas	Membahayakan rahasia pemerintah/SOPD	Melindungi informasi
57	Sistem informasi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB/P2)	- Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2011 - No. 1 Tahun 2015 dan No. 319/P/HT/2015	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahanpahaman informasi di mata publik
58	Informasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa	PMK No. 49 Tahun 2016, PP No. 22 Tahun 2015	Persatu (1) Tahun	Keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Keterbukaan informasi untuk masyarakat umum
59	Informasi Pelaporan Keuangan Desa	PMK No. 49 Tahun 2016, PP No. 22 Tahun 2015	Persatu (1) Tahun	Terkait dengan data keuangan pemerintah desa yang rahasia dan sensitif	Melindungi informasi pelaporan keuangan desa

60	Dokumen kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Swasta (investasi, eksplorasi dan kerja sama)	Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbulnya permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi pihak-pihak yang terlibat kerjasama
61	Dokumen pertanggungjawaban keuangan inspektoral termasuk data aplikasi SIMDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;</li> <li>- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</li> </ul>	Selama masih berlaku	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
VI	Informasi Inspektoral				
62	Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang	Pasal 17 huruf I dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masa berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara

	dalam bentuk surat ataupun dokumen		Selama masa berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
62	Kertas Kerja Audit (catatan / dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit yang mendukung laporan hasil audit (LHA))	Pasal 44 ayat (1) dan (2) serta pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan			
63	Dokumen Laporan Pengaduan Individu / masyarakat	UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Selama masa berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara
64	Proses pemeriksaan reguler/khusus pemeriksaan dengan tujuan tertentu provinsi dan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 6 dan pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008</li> <li>- UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008</li> <li>- perubahan ke 2 UU No. 32 Tahun 2004</li> <li>- UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara</li> </ul>	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menghambat proses pemeriksaan melanggar PP tentang distribusi LHP</li> <li>- melanggar peraturan menPAN tentang batasan distribusi LHP</li> </ul>	Memperlancarakan proses pemeriksaan dan tindak lanjut

			<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 1 Tahun 2004 tentang keuangan Negara</li><li>- PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PEMDA</li><li>- PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah</li><li>- PP No. 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS</li><li>- Permendagri No. 8 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan PEMDA</li><li>- Permendagri No. 28 Tahun 2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- permenPAN No. 5 tahun 2008 tentang standar audit aparat pengawasan intern pemerintah</li> <li>- permendagri No. 76 Tahun 2016 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kemendagri dan penyelenggaraan Pemda</li> </ul>			
VII	Informasi Kepegawaian				
65	Biodata anggota DPRD dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Negara RI Tahun 1945 pasal 28.a s/d 28.h</li> <li>- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Tidak terbatas anggota DPRD dengan pelantikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data anggota DPRD dan pribadi PNS</li> <li>- Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi anggota DPRD dan PNS yang bersifat rahasia
66	Dokumen/arsip/berkas PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Negara RI Tahun 1945 pasal 28.a s/d 28.h</li> <li>- Pasal 14 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>- Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

67	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 tentang KIP</li> <li>- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo.PP No. 13 Tahun 2000 tentang perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000</li> </ul>	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
68	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan diijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Negara RI Tahun 1945 pasal 28.a s/d 28.h</li> <li>- Pasal 14 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>- Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
69	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Negara RI Tahun 1945 pasal 28.a s/d 28.h</li> <li>- Pasal 14 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi PNS</li> <li>- Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

70	Sasaran kerja pegawai/SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008</li> <li>- UU No. 43/1999 tentang Kepegawaian</li> </ul>	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
71	SIMPEG (sistem informasi kepegawaian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah</li> </ul>	Tidak terbatas	Tidak membahayakan karena akan menghasilkan informasi tentang data pegawai dan dokumen PNS yang akurat untuk membantu pimpinan dalam merencanakan penerimaan pegawai, merencanakan penyebaran pegawai dan merencanakan pelatihan pegawai dimasa yang akan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelacakan informasi data seorang pegawai akan mudah dan cepat</li> <li>- Pembuatan laporan yang bersifat rutin dan berkala akan cepat dan mudah dikejakan</li> <li>- Mengetahui gambaran tentang nama-nam pegawai yang akan pension</li> </ul>
72	SIAP (Sistem Informasi Arsip Pegawai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian</li> </ul>	Tidak terbatas		
73	e-personal (Pengolahan Data Pegawai Perorangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendagri No. 45 Tahun 1992 tentang pokok-pokok kebijaksanaan sistem informasi manajemen departemen dalam negeri dan pemerintah daerah (SIMDAGRI/SIMDA)</li> <li>- Kepmendagri No. 140 Tahun 1997 tentang</li> </ul>			

	<p>rencana induk pengembangan sistem informasi manajemen Depdagri dan Pemda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS</li> </ul>	<p>dating. Membantu kelacaran administrasi dan manajemen kepegawaian agar pegawai mendapat hak serta melaksanakan kewajibannya dengan baik dan memudahkan pekerjaan dibidang kepegawaian dalam membuat laporan</p>	<p>dimasa mendatang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui gambaran tentang nama-nama pegawai yang akan naik pangkat dan mengetahui daftar kenaikan gaji berkala dimasa akan datang</li> <li>- Memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan data kepegawaian</li> <li>- Mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai yang cepat dan akurat</li> </ul>
--	--	--	---

					<p>- Mengetahui dan merencanakan suatu pekerjaan dan penerimaan pegawai baru</p> <p>- PNS yang bersangkutan bisa update data sendiri data kepegawaian di aplikasi e-personal</p>
74	Biodata elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
75	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran serta wawancara dalam rangka penyingkapan/penerimaan CPNS	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi

76	Proses pemberian/penolakan ijin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melakukan perceraian	Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan	Mengungkapkan data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
77	Identitas PNS yang melanggar disiplin dalam proses dijatuhkan hukuman : - Proses hukum disiplin PNS, keberatan atas hukuman dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS - Proses pemberhentian PNS - Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	- Sampai diterbitkan keputusan Bupati - Pasal 17 huruf I dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	- Tidak terbatas - Selama masih berlaku atau persetujuan PNS yang bersangkutan /pihak yang berwenang - Selama masih berlaku - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan	- Mengungkapkan rahasia pribadi - Mengungkapkan data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
VIII	Informasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
78	Informasi Program Keluarga Berencana - Pelayanan Tim	- UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan	Tidak terbatas	Publik dapat mengkritik dan memberikan saran	Mengetahui dan memahami program/kegiatan

<p>Keluarga Berencana Keliling Pelayanan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Kecamatan - Pelayanan KB Perusahaan Pelayanan KB-Kesehatan- PKK Tingkat Kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan keluarga PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2016 No. 114 Lembaga Negara RI No. 5887)</li> <li>- Perda Kabupaten Gunung Mas No. 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah kabupaten gunung mas Tahun 2016 No. 236, Tambahan lembaran daerah kabupaten gunung mas No. 236.a Perbup Gunung Mas No. 31 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gunung mas TA 2017 (Berita Daerah Kab. Gunung Mas Tahun 2016 No. 378</li> </ul>	pendapat	keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengendalian penduduk, penyuluh dan pergerakan KB
--	---	----------	--

79	<p>Dokumen perlindungan data pribadi penduduk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor KK, NIK dan Register</li> <li>- Lahir, Mati, Pindah dan Datang</li> <li>- Beberapa isi catatan peristiwa penting</li> </ul>	<p>- Pergub Gunung Mas No. 367 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemkab Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 No. 383)</p> <p>UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan</p>	Tidak terbatas	Membahayakan Negara apabila disalah gunakan terkait data pribadi kependudukan	Melindungi suatu kerahasiaan Negara mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah
----	--	--	----------------	---	---

IX	Informasi Pengendalian Penduduk dan KB	Mengetahui dan memahami program/kegiatan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengendalian penduduk, penyuluh dan pergerakan KB	Publik dapat mengkritik dan memberikan saran pendapat	Tidak terbatas	Mengetahui dan memahami program/kegiatan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengendalian penduduk, penyuluh dan pergerakan KB
80	Informasi Program Keluarga Sejahtera <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembina kelompok TRIBUNA (BK, BKR dan BKL)</li> <li>- Pembinaan dan pembentukan UPPKS</li> <li>- Penetapan Kelompok UPPKS yang ber-KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga</li> <li>- PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2016 No. 114 Lembaga Negara RI No. 5887)</li> <li>- Perda Kabupaten Gunung Mas No. 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah kabupaten gunung mas Tahun 2016 No. 236,</li> <li>- Tambahan lembaran daerah kabupaten gunung mas No. 236.a</li> <li>- Perbup Gunung Mas No. 31 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan</li> </ul>			
81	Informasi program pengendalian pemuktahiran data keluarga				
82	Informasi penyuluh dan perkembangan KB <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan KIA</li> <li>- Penguatan kerjasama dengan Organisasi Masyarakat</li> </ul>				

X 83	<p>Informasi Pendidikan</p> <p>Dokumen yang terkait dengan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket A, B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master naskah soal;</li> <li>- Naskah soal;</li> <li>- Proses</li> </ul>	<p>dan belanja daerah kabupaten gunung mas TA 2017 (Berita Daerah Kab. Gunung Mas Tahun 2016 No. 378</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pergub Gunung Mas No. 367 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemkab Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 No. 383)</li> <li>- Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ul>	Sampai dengan selesainya jenjang ujian	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen soal ujian
---------	--	--	--	----------------	---

	<p>pemindaian / scanning;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scoring;</li> <li>- Pencetakan dan nama pencetakan</li> </ul>					
84	Hasil test kemampuan fisik	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penetapan lebih lanjut	Dapat mengungkapkan data kemampuan seseorang	Melindungi rahasia data seseorang	
XI	Informasi Kesehatan					
85	Data rekam medis anggota DPRD dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Negara RI Tahun 1945 pasal 28.a s/d 28.h</li> <li>- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10)</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi anggota DPRD dan PNS</li> <li>- Dapat merugikan anggota DPRD dan PNS</li> <li>- Melanggar HAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi anggota DPRD dan PNS yang bersifat rahasia</li> <li>- Melindungi keamanan dan kenyamanan anggota DPRD dan PNS</li> </ul>	
86	Ketersediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psitropika atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 5 Tahun 1997 tentang psitropika pasal 33 dan 34 u;</li> <li>- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>- Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan ketersediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan ketersediaan farmasi	

		<p>kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>			
87	Hasil audit medik pada saran kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 47</li> <li>- Pasal 6 dan 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari objek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pasien dan citra sarana kesehatan
88	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 74</li> <li>- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari objek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pasien dan citra sarana kesehatan
89	Informasi pasien HIV-AIDS	Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medik	Informasi dibuka untuk kepentingan hukum dan persetujuan pasien	Merugikan pasien / kecenderungannya terjadinya diskriminasi bagi pasien HIV-AIDS dimasyarakat sehingga terjadinya pelanggaran terhadap HAM	Menjaga privasi pasien
90	Pokjanel posyandu	Permendagri No 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan	Tidak terbatas	Adanya informasi tentang kegiatan posyandu se	Tersedianya informasi tentang kegiatan

		social dasar dipos pelayanan terpadu		kabupaten gunung mas	posyandu se kabupaten gunung mas
91	Data hasil check up perorangan PNS				
XII	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM				
92	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan</li> <li>- Pasal 17 huruf l dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Sampai dengan penetapan dan penangguhan UMP dan UMK	Menimbulkan permasalahan dan polemic dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatik
93	Biodata tenaga kerja asing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan</li> <li>- Permenaker No. 02 Tahun 2008 tentang tata cara penggunaan tenaga asing</li> </ul>	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA
XIII	Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan				
94	Proses sertifikasi mutu dan uji mutu yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> </ul>	Sampai selesai penelitian	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan

	Kecamatan Pangan Daerah	- UU No. 7/1996 tentang Pangan; - UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; - UU No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan; - PP No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan	yang ingin mencari keuntungan	sertifikasi
XIV 95	Infomasi Kekayaan Alam Hasil penelitian potensi sumber daya alam flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi kawasan taman hutan raya (TAHURA LAPAK JARU) kabupaten gunung mas	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/menjaga kekayaan alam Indonesia

